

## **KEJATI PERIKSA WAKIL BUPATI KONUT DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN PESANTREN**



*ldiisurabaya.org*

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra sedang mengintensifkan penyelidikan<sup>(i)</sup> kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pesantren di Kabupaten Konawe Utara (Konut). Pesantren Hasmuddin Handanwandi Nahdlatul Wathan yang rencana dibangun di Desa Tetewatu, Kecamatan Wiwirano, menyedot anggaran APBD tahun 2009 senilai Rp200 juta. Sayangnya, pesantren yang dimaksud belum berdiri hingga saat ini.

Dalam penyelidikan jaksa, perkara tersebut menyeret nama Wakil Bupati Konut, Ir. Ruksamin. Pasangan Aswad Sulaiman itu harus menghadiri panggilan penyidik<sup>(ii)</sup>, kemarin (12/6). Ruksamin tiba di Kejati Sultra sekira pukul 12.15 Wita dan langsung menuju ke ruangan penyidik tindak pidana khusus (Pidsus).

Ruksamin dicecar 10 pertanyaan yang berkaitan dengan proyek pembangunan pesantren Hasmuddin Handanwandi Nahdlatul Wathan. Anggaran<sup>(iii)</sup> yang dialokasikan untuk membangun pesantren tersebut telah cair, namun bukti fisik pembangunannya belum ada. Kasi Penkum dan Humas Kejati Sultra, Baharuddin MH mengatakan, kehadiran Wakil Bupati Konut baru sekadar memberikan klarifikasi atas laporan dugaan korupsi pembangunan pesantren tersebut. Pihaknya belum memastikan pemanggilan lanjutan terhadap Ruksamin. Selain Ruksamin, sejumlah oknum yang diduga memiliki keterkaitan dengan pencairan anggaran tersebut telah dimintai keterangan.

“Hasil pemeriksaan terhadap Ruksamin belum bisa disampaikan pada kesempatan ini. Yang jelas Ruksamin datang untuk memberikan klarifikasi. Kehadiran Ruksamin ini untuk memenuhi panggilan yang ketiga. Terkait

dengan ketidakhadirannya atas panggilan jaksa yang pertama dan kedua dijawab dengan alasan kesibukannya melaksanakan tugas negara," terangnya.

Baharuddin menambahkan, setelah pencairan anggaran senilai Rp 200 juta untuk pembangunan pesantren, Pemda Konut tidak melakukan pengawasan. Mereka tidak pernah melakukan cek *and* ricek terhadap pelaksanaan proyek tersebut. "Anggaran sebesar Rp 200 juta sudah cair, sedangkan pesantren belum ada. Nah, ini yang masih ditelusuri penyidik, siapa-siapa yang harus bertanggung jawab," tukasnya.

Hingga saat ini, jaksa belum menetapkan calon tersangkanya. "Kasus ini masih lidik. Kami masih mengumpulkan bukti-bukti. Saksi yang kita periksa, sudah ada beberapa orang," ungkap Baharuddin.

Dugaan penyalahgunaan dana APBD pada pembangunan pesantren Hasmuddin Hamsanwandi Nahdlatul Wathan Kabupaten Konut terungkap berawal dari laporan masyarakat. Dalam laporan itu, Wakil Bupati Konut itu disebut-sebut adalah orang yang bertanggungjawab dalam pembangunan pesantren di Konut. Dana sebesar Rp 200 juta dicairkan melalui dana Pos Bantuan Setda Konut tahun 2009. Namun, realisasi pembangunannya diduga fiktif<sup>(iv)</sup>.

### **Sumber Berita :**

Kendari Pos, 13 Juni 2014

kendarinews.com, 9 Mei 2014

- 
- (i) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
  - (ii) Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
  - (iii) Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
  - (iv) Fiktif adalah bersifat fiksi, tidak sesuai dengan kenyataan, tidak nyata, hanya terdapat di khayalan; sesuatu yang diada-adakan atau dikarang-karang atau dibuat-buat, misalnya pembayaran fiktif, kegiatan fiktif. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).